

## ABSTRAK

Defri Fahdillah (0820612056), Penetapan Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini R, S.H, S.pN, M.Kn.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Hubungan tersebut merupakan kekayaan nasional yang menentukan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan dan harmoni bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk berbagai keperluan, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukan tanah. Penelantaran tanah menyebabkan hilangnya nilai sosial tanah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Upaya secara yuridis untuk menangani tanah terlantar yang dilakukan Pemerintah, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Namun, peraturan tersebut memiliki banyak kelemahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria sehingga suatu bidang tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan suatu bidang tanah menjadi tanah terlantar. Dalam mengumpulkan bahan materi penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Keberadaan tanah terlantar jika tidak segera ditangani secara serius, menyimpan potensi permasalahan yang lebih besar. Oleh karena itu upaya penertiban yang dilakukan pemerintah merupakan hal penting untuk dikaji, yang merupakan salah satu upaya perwujudan pembaharuan di bidang agraria.

Kata Kunci: Tanah, Terlantar, Badan Pertanahan Nasional.

## ABSTRACT

Defri Fahdillah (0820612056), Determination of Soil Displacement Based on Government Regulation No. 11 Year 2010 regarding Control and Utilization of Abandoned Land. Under the guidance of Hj. Devi Kantini R, SH, S.pN, M.Kn.

Land is a gift from Almighty God for the welfare of the Indonesian people, so the relationship with the land of the Indonesian nation is eternal. These relationships are national assets that determine the welfare, prosperity, justice, sustainability and harmony to the nation of Indonesia. In the development rights to the land that had been granted for various purposes, it is not always followed by physical activity such land use in accordance with the nature and purpose of their rights or of the use of spatial planning and land use. Abandoned land causes the social value of land become lose as mandated in Article 6 of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 On the Basic Agrarian Principles which states that "all rights to the land has a social function". Efforts to deal with the abandoned land legally by the Government, by issuing Government Regulation Number 36 Year 1998 regarding Control and Utilization of Abandoned Land. However, the law has many flaws in its implementation. Therefore, the Government has issued Government Regulation No. 11 Year 2010 regarding Control and Utilization of Abandoned Land in lieu of Government Regulation No. 36 Year 1998. This study aims to determine the criteria that an area of land can be defined as wastelands based on Government Regulation No. 11 Year 2010 on the Control and Utilization of Land Displacement and the constraints faced by the National Land Agency in setting an area of land as an abandoned land. In gathering the material used is a method of writing The studies normative or library research. The presence of abandoned land if it is not immediately taken seriously, keep a greater potential for problems. Therefore, the government's enforcement efforts are important to study, which is one manifestation of the efforts in the field of agrarian reform.

Keywords: Land, Abandoned, National Land Agency.